

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasanya Notaris yang menjadi turut tergugat atau tergugat didalam perkara perdata, terhadapnya tidak terlaksana ketentuan Pasal 66 UUJN yakni Hakim dalam memanggil Notaris ke Pengadilan tidak melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris karena dalam hal gugat menggugat merupakan hak dan kewajiban keperdataan setiap orang sehingga dalam perkara ini Notaris belum terlindungi haknya selaku pejabat umum karena Majelis Hakim tidak mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penerapan aturan hukum yang diatur dalam UUJN sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya.
2. Kekuatan pembuktian dari akta Notaris dalam Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang bahwasanya akta tersebut cacat hukum oleh karenanya turun kekuatan pembuktiannya menjadi akta dengan pembuktian dibawah tangan karena dalam pembentukannya berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian akta ini juga tidak lagi memenuhi unsur objektif sebuah perjanjian karenanya Majelis Hakim menilai termasuk kedalam perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan konsekuensinya akta tersebut diputus oleh Majelis Hakim batal demi

hukum dan terhadap keputusan ini menyebabkan akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Notaris dalam Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Padang adalah dengan melakukan gugatan balik terhadap pihak yang menggugat Notaris yakni Notaris membuktikan bahwa akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang tidak melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN dengan melakukan penjelasan bahwa akta yang dibuat berdasarkan permintaan para pihak sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta yakni membuktikan kebenaran aktanya dari aspek lahiriah, formal dan materil.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah bahwasanya pengawasan, pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris dikembalikan lagi kewenangannya kepada Pengadilan Negeri sebagaimana aturan sebelum berlakunya UUJN, sehingga kedudukan Notaris beserta kewenangannya selaku pejabat pembuat alat bukti sempurna dapat terlindungi dari gugatan-gugatan yang menyangkut kepada substansi isi dari akta yang dibuatnya selain hanya kepada gugatan-gugatan yang menyangkut aspek formil pembuatan akta yang telah diatur dalam UUJN untuk membuat suatu akta otentik.

2. Disarankan kepada Notaris hendaknya agar lebih hati-hati, cermat dan teliti menerapkan aturan hukum yang akan dituangkan dalam akta serta selalu menyadari akibat hukum yang ditimbulkan dari setiap akta yang dibuatnya karena akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
3. Disarankan kepada Notaris bahwa sebelum proses pembuatan akta dan menyepakati menerima permintaan pembuatan akta untuk para pihak hendaknya terlebih dahulu Notaris harus dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap sesuai dengan akta yang ingin dibuat dengan Ilmu Kenotariatan yang dimilikinya, serta meyakini dan mengetahui bahwa segala surat menyurat, identitas-identitas penghadap, objek dan keterangan-keterangan yang diberikan pihak kepada Notaris adalah benar agar akta yang dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk mempertahankan legalitas dari suatu akta otentik.

